



Judul : Penyaluran PMN; Pengawasannya Bisa Libatkan Pihak Ketiga
Tanggal : Minggu, 12 November 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Penyaluran PMN Pengawasannya Bisa Libatkan Pihak Ketiga

BADAN Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR menerima sejumlah masukan soal penyaluran Penyerahan Modal Negara alias PMN dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Salah satunya, masukan soal pelibatan konsultan independen untuk pengawasan PMN ini.

“Pasalnya diketahui selama ini review PMN dilakukan *assessment*-nya oleh pihak Bappenas, Kementerian Keuangan, BUMN tanpa melibatkan pihak ketiga,” ujar Ketua BAKN DPR Wahyu Sanjaya usai melakukan Kunjungan Kerja ke IPB di Bogor, Selasa (7/11).

Adapun masukan lainnya, penyaluran PMN untuk pangan dan air bersih. Persoalan ketahanan pangan membutuhkan peta jalan atau *grand design* seperti yang diinginkan pemerintah dalam hal ini.

“Jika menginginkan ketahanan pangan secara nyata perlu adanya target pembentukan, kemampuan produksi, serta cadangan pangan tersebut seperti apa dalam beberapa tahun. Bantuan PMN harus memahami yang diperlukan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan,” jelas Politisi Dapil Sumatera Selatan II.

Lebih lanjut Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan adanya persoalan tidak tepat sasaran dalam penyaluran PMN. Menurutnya perlu penekanan kembali pada proses review dan perencanaan awal yang perlu dikuatkan lagi.

“Seperti usulan melibatkan pihak ketiga agar persoalan tersebut tidak akan terjadi lagi secara berulang,” ungkapnya.

Dia bilang, review itu menjadi penting tidak hanya dilakukan di depan akan tetapi secara periode bisa per semester atau per tahun sehingga bisa melakukan pengawasan tepat guna dan tepat sasaran.

Di tempat yang sama Rektor IPB Arief Satria mengapresiasi langkah BAKN DPR untuk terus mengevaluasi PMN yang diberikan kepada BUMN. Karena, uang negara harus dipertanggungjawabkan efektivitas pemanfaatannya.

“Saya mengusulkan agar segera dilakukan mapping terhadap BUMN yang memanfaatkan PMN. Mana yang

sukses, mana yang setengah sukses, mana yang tidak sukses, mana yang proyeknya mangkrak, mana proyeknya molor dan yang mana yang kira-kira tidak dikelola secara profesional,” jelasnya.

Lanjutnya ia menjelaskan pada hakikatnya BUMN itu harus punya mental sebagai perusahaan, bukan mental sekumpulan ASN. “Peran BUMN terkait penyaluran PMN terutama yang berkaitan dengan proyek proyek yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti, soal air dan pangan masih urgen harus dikelola secara profesional dan akuntabel,” ungkapnya.

Anggota BAKN DPR Irwan Ardi Hasman menambahkan, suntikan modal negara ke BUMN agar lebih fokus kepada kemandirian pangan. Pasalnya, hingga saat ini para petani di daerah masih banyak yang mengeluhkan harga pupuk mahal sehingga harus membeli yang non subsidi. Di sisi lain, pupuk bersubsidi di pasaran jumlahnya sangat langka, sehingga mengakibatkan harga-harga hasil produksi petani *lokal jauh lebih mahal* jika dibandingkan impor.

“Diharapkan turun tangan pemerintah dalam pemberian PMN, dapat membantu petani dalam hal pembelian pupuk, meningkatkan daya beli masyarakat dengan mengurangi harga yang ditawarkan,” ungkapnya.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan ketersediaan lahan untuk para petani saat ini masih sulit. Padahal, Indonesia memiliki banyak lahan. Sehingga, jangan sampai lahan-lahan yang ada malah digunakan sejumlah kepentingan untuk pembangunan properti, terutama PT Perkebunan Nusantara yang memiliki lahan bagus untuk bertani.

“Kami meminta pihak IPB dapat memberikan kajian yang lebih mendalam mengenai penyelesaian seluruh permasalahan ketahanan pangan yang menjadi target bersama. Di negara kita Indonesia kemandirian pangan ini mutlak bukan hanya infrastruktur namun pangan juga agar bisa menjadi prioritas,” jelas Politisi Dapil Jawa Barat III. ■ KAL